



MODUL / BUKU AJAR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

Berbasis Rencana Pembelajaran Semester (RPS) MAP6111

Identitas Mata Kuliah

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Kode Mata Kuliah : MAP6111

Bobot : 2 SKS

Semester : 2

Model Pembelajaran : Project-Based Learning

Luaran Utama : Analisis kebijakan, rekomendasi kebijakan, dan policy brief daerah

Disusun untuk mendukung pembelajaran, penguatan dokumen mutu, dan pengembangan kompetensi akademik mahasiswa pascasajana.



PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2026

MODUL / BUKU AJAR

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

Berbasis Rencana Pembelajaran Semester (RPS) MAP6111

Identitas Mata Kuliah

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Kode Mata Kuliah : MAP6111

Bobot : 2 SKS

Semester : 2

Model Pembelajaran : Project-Based Learning

Luaran Utama : Analisis kebijakan, rekomendasi kebijakan, dan policy brief daerah

Disusun untuk mendukung pembelajaran, penguatan dokumen mutu, dan pengembangan kompetensi akademik mahasiswa pascasarjana.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG
2026**

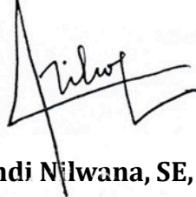
HALAMAN PENGESAHAN

Judul Modul	Modul / Buku Ajar Administrasi Pembangunan Daerah Berkelanjutan
Program Studi	Magister Administrasi Publik
Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Kode Mata Kuliah	MAP6111
SKS / Semester	2 SKS / Semester 2
Penyusun	Tim Pengampu Mata Kuliah
Dosen Pengampu	Dr. Apt. Pratiwi Ramlan, S.Farm., M.AP Dr. Erfina, S.Sos., M.Si
Tahun Akademik	2025/2026

Modul ini disahkan sebagai bahan ajar pendukung resmi mata kuliah Administrasi Pembangunan Daerah Berkelanjutan pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

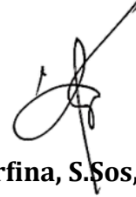
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Andi Nilwana, SE, M.Si.

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Erfina, S.Sos, M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Administrasi Pembangunan Daerah Berkelanjutan ini dapat disusun sebagai bahan ajar pendukung bagi mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Modul ini dikembangkan berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah Administrasi Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang menekankan penguasaan konsep pembangunan berkelanjutan, analisis kebijakan pembangunan daerah, tata kelola kolaboratif, serta kemampuan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan studi empiris.

Sebagai modul pascasarjana, naskah ini tidak hanya menyajikan landasan teoretis, tetapi juga memadukan konteks kebijakan publik Indonesia, tata kelola daerah, digital governance, smart region, dan penguatan kapasitas analitis mahasiswa. Setiap bab dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, uraian materi, kasus administrasi publik, ringkasan, latihan berpikir tingkat tinggi, serta tugas proyek.

Kami menyadari bahwa modul ini masih dapat terus disempurnakan. Oleh karena itu, masukan dari dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga modul ini bermanfaat bagi penguatan kualitas pembelajaran, pengembangan tradisi akademik, dan peningkatan mutu lulusan.

Sidenreng Rappang, 2026
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB 1 Pendahuluan	6
BAB 2 Konsep Dasar Pembangunan Daerah Berkelanjutan	9
BAB 3 Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	11
BAB 4 Tata Kelola Pembangunan Daerah	13
BAB 5 Inovasi, Pemberdayaan, Lingkungan, dan Digital Governance	15
BAB 6 Analisis Kebijakan Berbasis Bukti dan Studi Kasus	17
BAB 7 Proyek Akademik, Penilaian, dan Luaran Pembelajaran	19
BAB 8 Penutup	21
Daftar Pustaka	22
Lampiran 1. Peta Capaian Pembelajaran	23
Lampiran 2. Rubrik Penilaian Policy Brief	24
Lampiran 3. Template Policy Brief	25

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 1. Peta CPL, CPMK, dan Sub-CPMK Mata Kuliah	7
Tabel 2. Perbandingan paradigma pembangunan daerah	9
Tabel 3. Perangkat perencanaan pembangunan daerah	11
Tabel 4. Prinsip good governance dalam pembangunan daerah	13
Tabel 5. Kerangka analisis collaborative governance	14
Tabel 6. Matriks isu strategis pembangunan daerah berkelanjutan	15
Tabel 7. Langkah penyusunan policy brief	17
Tabel 8. Rubrik penilaian proyek akhir	19

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta alur pembelajaran mata kuliah	7
Gambar 2. Siklus kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan	11
Gambar 3. Alur penyusunan policy brief	17

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi pembangunan daerah merupakan bidang kajian strategis dalam administrasi publik karena menyentuh hubungan langsung antara negara, masyarakat, pasar, dan lingkungan dalam proses perubahan sosial yang terencana. Pada era desentralisasi, pembangunan daerah tidak lagi dipahami semata-mata sebagai proyek fisik atau perluasan belanja pemerintah, melainkan sebagai proses tata kelola yang menuntut kemampuan perencanaan, koordinasi, kolaborasi, inovasi kebijakan, dan akuntabilitas publik.

Paradigma pembangunan berkelanjutan memperluas horizon administrasi pembangunan dengan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan harus dikelola secara serempak. Oleh sebab itu, mahasiswa magister administrasi publik perlu dibekali kemampuan untuk membaca isu pembangunan daerah secara komprehensif, menilai desain kebijakan, memahami peran para aktor, dan merumuskan rekomendasi yang aplikatif serta berbasis bukti.

RPS mata kuliah ini menunjukkan bahwa pembelajaran bergerak bertahap dari penguasaan konsep dasar, analisis kebijakan dan sistem perencanaan, evaluasi tata kelola, hingga perumusan rekomendasi kebijakan dan policy brief. Karena itu, modul ini disusun bukan sekadar sebagai ringkasan materi kuliah, tetapi sebagai buku ajar yang dapat memandu mahasiswa memahami teori, menganalisis praktik, dan menghasilkan luaran akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

1.2 Urgensi Mata Kuliah

- menghubungkan teori administrasi publik dengan praktik pembangunan daerah berkelanjutan;
- menguatkan kemampuan evaluasi kebijakan pembangunan berbasis data dan konteks lokal;
- membekali mahasiswa memahami tata kelola kolaboratif, good governance, dan digital governance;
- menyiapkan luaran akademik berupa analisis kebijakan, policy brief, dan rekomendasi berbasis bukti.

1.3 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Berdasarkan RPS, mata kuliah ini ditopang oleh enam CPL prodi, empat CPMK, dan enam Sub-CPMK. Capaian tersebut menegaskan bahwa pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan konsep, tetapi diarahkan hingga kemampuan evaluasi, formulasi strategi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Komponen	Rumusannya
CPL Utama	Analisis teori administrasi publik; perumusan kebijakan publik; integrasi pendekatan kolaboratif; penelitian ilmiah; good governance, digital governance, dan inovasi kebijakan; sikap profesional dan etis.
CPMK 1	Menganalisis konsep, teori, dan paradigma

	pembangunan daerah berkelanjutan.
CPMK 2	Mengevaluasi kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka keberlanjutan.
CPMK 3	Merumuskan strategi tata kelola pembangunan daerah melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif.
CPMK 4	Mengembangkan model atau rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berbasis analisis akademik dan studi empiris.
Sub-CPMK	Menjelaskan konsep dasar; menganalisis hubungan kebijakan dan pembangunan; mengevaluasi implementasi; mengidentifikasi aktor kolaborasi; merancang strategi; menyusun analisis kebijakan berbasis studi kasus atau penelitian.

Tabel 1. Peta CPL, CPMK, dan Sub-CPMK Mata Kuliah

1.4 Peta Pembelajaran

Secara pedagogis, alur pembelajaran mata kuliah ini dapat dibaca sebagai lintasan dari konseptualisasi ke analisis, lalu menuju formulasi kebijakan. Minggu pertama hingga ketujuh menyiapkan fondasi konseptual dan tata kelola. Minggu kesembilan hingga kelima belas membawa mahasiswa ke isu inovasi, ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, lingkungan, digital governance, dan formulasi rekomendasi kebijakan.

Konsep dasar	Kebijakan & perencanaan	Tata kelola	Analisis isu strategis	Policy brief
--------------	-------------------------	-------------	------------------------	--------------

Gambar 1. Peta alur pembelajaran mata kuliah

Contoh Kasus Administrasi Publik

Sebuah pemerintah kabupaten memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tetapi angka stunting, kualitas sanitasi, dan degradasi lingkungan belum membaik. Kasus ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dinilai dengan satu indikator ekonomi saja; diperlukan pendekatan kebijakan yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Konteks Smart Village / Digital Governance

Dalam konteks daerah pedesaan, pembangunan berkelanjutan dapat diperkuat melalui digitalisasi layanan desa, dashboard data pembangunan, integrasi data stunting dan kemiskinan, sistem pengaduan berbasis aplikasi, serta transparansi penggunaan dana desa. Praktik ini mempertemukan aspek keberlanjutan, tata kelola, dan inovasi layanan.

1.5 Ringkasan, Latihan, dan Tugas

Bab ini menegaskan bahwa administrasi pembangunan daerah berkelanjutan adalah mata kuliah yang memadukan landasan teoritis, evaluasi kebijakan, tata kelola, dan keterampilan akademik untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Jelaskan mengapa pembangunan daerah harus dibaca sebagai proses administrasi publik, bukan semata proyek pembangunan fisik.
- Analisislah satu persoalan pembangunan di daerah Anda dan tunjukkan keterkaitan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- Buat peta awal isu kebijakan daerah yang dapat dijadikan objek tugas proyek semester.

BAB 2 KONSEP DASAR PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

2.1 Hakikat Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah proses perubahan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah melalui kebijakan, program, dan pengelolaan sumber daya yang terarah. Dalam perspektif administrasi publik, pembangunan daerah bukan hanya soal tujuan, tetapi juga soal kapasitas institusi, kualitas koordinasi, legitimasi kebijakan, dan kemampuan birokrasi menerjemahkan visi pembangunan ke dalam tindakan kolektif.

Pendekatan pembangunan daerah modern tidak lagi bertumpu pada model sentralistik. Desentralisasi menuntut pemerintah daerah memahami karakter lokal, memetakan kebutuhan warga, memanfaatkan potensi daerah, dan mengelola jejaring aktor secara lebih adaptif. Karena itu, kualitas pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah mengorganisasi pengetahuan, data, partisipasi, serta sumber daya lintas sektor.

2.2 Pembangunan Berkelanjutan dan Administrasi Publik

Pembangunan berkelanjutan menekankan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dalam konteks administrasi publik, konsep ini mengharuskan perencanaan dan pengambil kebijakan menyeimbangkan tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil secara fiskal dapat gagal secara sosial jika memperlebar kesenjangan, atau gagal secara ekologis jika merusak daya dukung lingkungan.

2.3 Paradigma Pembangunan

Dalam studi pembangunan daerah, terdapat pergeseran dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma tata kelola berkelanjutan. Pergeseran ini dapat dipahami melalui perbandingan berikut.

Aspek	Paradigma pertumbuhan	Paradigma keberlanjutan	Implikasi administrasi publik
Tujuan utama	Kenaikan output dan investasi	Keseimbangan ekonomi, sosial, lingkungan	Pemerintah harus mengelola indikator multidimensi
Aktor dominan	Pemerintah dan investor	Pemerintah, masyarakat, sektor privat, komunitas	Diperlukan tata kelola kolaboratif
Ukuran keberhasilan	Pertumbuhan PDRB, proyek fisik	Kualitas hidup, inklusi sosial, daya dukung lingkungan	Evaluasi kebijakan harus lebih komprehensif
Instrumen	Program sektoral dan top-down	Kebijakan lintas sektor dan partisipatif	Koordinasi antarlembaga menjadi krusial

Tabel 2. Perbandingan paradigma pembangunan daerah

2.4 Isu Kunci Pembangunan Daerah

Isu pembangunan daerah di Indonesia umumnya meliputi disparitas wilayah, kemiskinan, stunting, ketimpangan layanan dasar, pengangguran, rendahnya inovasi ekonomi lokal, kerusakan lingkungan, serta lemahnya integrasi perencanaan dan penganggaran. Isu-isu tersebut saling berkaitan dan menuntut respons kebijakan yang tidak terfragmentasi.

Mahasiswa perlu memahami bahwa masalah pembangunan daerah hampir selalu bersifat wicked problems: multidimensi, melibatkan banyak aktor, memiliki sebab yang saling tumpang tindih, dan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi secara sendiri. Karena itu, keterampilan diagnosis masalah menjadi fondasi bagi penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

Contoh Kasus Administrasi Publik

Program penanggulangan stunting di suatu kabupaten tidak efektif karena intervensi gizi, sanitasi, edukasi keluarga, dan pendataan tidak berjalan terpadu. Kasus ini menunjukkan bahwa isu pembangunan daerah memerlukan integrasi kebijakan antar organisasi, bukan hanya penambahan anggaran.

Studi Smart Region

Smart region bukan sekadar penggunaan aplikasi, tetapi kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan data spasial, data kemiskinan, data layanan, dan sistem pemantauan program agar keputusan pembangunan lebih cepat, akurat, dan transparan.

2.5 Ringkasan, Latihan, dan Tugas

Bab ini menegaskan bahwa pembangunan daerah berkelanjutan harus dipahami sebagai proses tata kelola yang menuntut integrasi tujuan, aktor, dan indikator keberhasilan secara lebih luas daripada paradigma pertumbuhan tradisional.

- Bandingkan paradigma pertumbuhan dengan paradigma keberlanjutan pada satu kasus pembangunan daerah.
- Identifikasi satu wicked problem pembangunan daerah dan jelaskan mengapa ia tidak bisa diselesaikan oleh satu organisasi saja.
- Buat catatan analitis 2-3 halaman tentang isu prioritas pembangunan berkelanjutan di wilayah Anda.

BAB 3 KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan daerah adalah seperangkat keputusan strategis yang dirancang untuk mengarahkan perubahan wilayah sesuai tujuan pembangunan. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan tidak boleh dipahami hanya sebagai dokumen, tetapi sebagai proses mulai dari perumusan agenda, penyusunan alternatif, legitimasi politik, implementasi, hingga evaluasi.

Hubungan antara kebijakan dan pembangunan daerah menjadi penting karena kualitas hasil pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas desain kebijakan, kapasitas implementasi, dan konsistensi dukungan kelembagaan. Kebijakan yang baik harus responsif terhadap data, menjawab kebutuhan warga, mempertimbangkan keterbatasan fiskal, dan selaras dengan prioritas jangka panjang daerah.

Agenda isu	Perumusan alternatif	Keputusan	Implementasi	Evaluasi
------------	----------------------	-----------	--------------	----------

Gambar 2. Siklus kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan

3.2 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah di Indonesia bertumpu pada instrumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Ketiganya bukan sekadar berkas administratif, tetapi rantai logika yang menentukan bagaimana visi jangka panjang dijabarkan ke sasaran menengah dan program tahunan.

Dokumen	Horizon waktu	Fungsi utama	Catatan analitis
RPJPD	20 tahun	Arah pembangunan jangka panjang daerah	Menjadi horizon strategis lintas kepala daerah
RPJMD	5 tahun	Penjabaran visi-misi kepala daerah	Harus sinkron dengan indikator kinerja dan penganggaran
RKPD	1 tahun	Prioritas tahunan daerah	Menjadi titik temu perencanaan dan penganggaran

Tabel 3. Perangkat perencanaan pembangunan daerah

3.3 Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja

Masalah klasik pembangunan daerah terletak pada lemahnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Banyak program disusun sesuai nomenklatur administratif, tetapi tidak ditopang diagnosis masalah yang memadai. Akibatnya, program berjalan, anggaran terserap, tetapi dampak kebijakan tidak signifikan.

Pada tingkat pascasarjana, mahasiswa perlu dibekali kemampuan membaca dokumen rencana secara kritis: apakah target realistis, indikator tepat, program menjawab masalah, dan apakah ada kesinambungan antara dokumen perencanaan dengan implementasi kebijakan.

Contoh Kasus Administrasi Publik

Sebuah RKPD menetapkan prioritas pengurangan kemiskinan, tetapi program unggulan justru lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik yang tidak menyasar rumah tangga rentan. Kasus semacam ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara diagnosis masalah, alokasi anggaran, dan indikator hasil.

Studi Smart Village / Digital Governance

Integrasi dashboard kinerja daerah, e-planning, dan e-budgeting dapat meningkatkan ketertelusuran keputusan pembangunan. Dengan sistem digital yang baik, pemerintah daerah dapat memantau apakah prioritas pembangunan benar-benar diikuti oleh belanja program dan capaian output.

3.4 Ringkasan, Latihan, dan Tugas

Bab ini menekankan bahwa kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah harus dibaca sebagai sistem. Mahasiswa tidak cukup menghafal jenis dokumen, tetapi perlu memahami logika hubungan antara diagnosis masalah, prioritas, anggaran, dan hasil kebijakan.

- Analisis keterkaitan RPJMD dan RKPD pada satu isu prioritas pembangunan daerah.
- Jelaskan akibat administratif ketika perencanaan dan penganggaran tidak sinkron.
- Susun matriks sederhana masalah-tujuan-program-indikator untuk satu isu daerah.

BAB 4 TATA KELOLA PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Good Governance dalam Pembangunan

Good governance merupakan landasan normatif dan operasional bagi pembangunan daerah yang efektif, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi hasil. Prinsip ini menuntut adanya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, serta keadilan dalam proses dan hasil pembangunan.

Prinsip	Makna operasional	Contoh penerapan daerah
Transparansi	Informasi program dan anggaran terbuka	Portal data pembangunan dan dashboard publik
Partisipasi	Warga dan pemangku kepentingan terlibat	Musrenbang, forum konsultasi, pengaduan daring
Akuntabilitas	Kinerja dapat dipertanggungjawabkan	Pelaporan berbasis indikator hasil
Efektivitas-efisiensi	Sumber daya digunakan optimal	Prioritas program berdampak tinggi
Keadilan	Manfaat pembangunan menjangkau kelompok rentan	Kebijakan afirmatif bagi wilayah tertinggal

Tabel 4. Prinsip good governance dalam pembangunan daerah

4.2 Collaborative Governance

Collaborative governance menekankan bahwa isu pembangunan daerah sering kali memerlukan kerja sama lintas organisasi, lintas sektor, dan lintas tingkat pemerintahan. Pemerintah daerah tetap memegang peran sentral, tetapi keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas membangun jejaring yang produktif dengan masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, media, dan komunitas lokal.

Pendekatan kolaboratif tidak identik dengan membagi tugas secara seremonial. Kolaborasi yang bermakna menuntut kejelasan tujuan, kepercayaan antarpihak, mekanisme koordinasi, distribusi peran, pertukaran data, kepemimpinan fasilitatif, serta evaluasi bersama.

Dimensi	Pertanyaan kunci	Indikator analitis
Aktor	Siapa saja yang terlibat?	Pemerintah, komunitas, sektor privat, akademisi
Proses	Bagaimana mereka berinteraksi?	Forum, negosiasi, koordinasi, mekanisme kerja

Sumber daya	Apa yang dipertukarkan?	Data, pendanaan, legitimasi, pengetahuan
Hasil	Apa dampak kolaborasi?	Perbaikan layanan, efektivitas program, inovasi

Tabel 5. Kerangka analisis collaborative governance

4.3 Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berperan sebagai pengarah, regulator, fasilitator, dan integrator pembangunan. Dalam kerangka keberlanjutan, birokrasi daerah tidak boleh bekerja secara sektoral dan reaktif. Ia harus mampu menghubungkan program, memediasi kepentingan, dan menjadikan data sebagai dasar keputusan.

Contoh Kasus Administrasi Publik

Penanganan stunting menuntut sinergi dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, pemerintah desa, puskesmas, kader, serta sektor swasta. Bila koordinasi hanya formal, intervensi akan terfragmentasi. Bila tata kelola kolaboratif berjalan, hasil kebijakan cenderung lebih terukur.

Studi Smart Village

Dalam tata kelola desa cerdas, pemerintah daerah dapat memfasilitasi interoperabilitas data desa, pelatihan aparatur, integrasi layanan dasar, dan monitoring program pembangunan desa berbasis data real time.

4.4 Ringkasan, Latihan, dan Tugas

Bab ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola. Good governance memberi kerangka normatif, sedangkan collaborative governance memberi mekanisme praktis untuk menangani isu-isu lintas sektor.

- Jelaskan perbedaan antara koordinasi birokratik biasa dan collaborative governance.
- Pilih satu program pembangunan daerah dan identifikasi aktor-aktor kuncinya.
- Susun peta kolaborasi untuk satu isu daerah lengkap dengan peran dan kontribusi setiap aktor.

BAB 5 INOVASI, PEMBERDAYAAN, LINGKUNGAN, DAN DIGITAL GOVERNANCE

5.1 Inovasi Kebijakan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Inovasi kebijakan merupakan upaya memperbarui cara kerja, instrumen, atau model intervensi publik agar lebih responsif terhadap masalah pembangunan. Dalam konteks daerah, inovasi tidak selalu berarti teknologi tinggi; inovasi dapat berupa integrasi layanan, perubahan tata kerja, kebijakan afirmatif, penguatan jejaring lokal, atau model kemitraan baru untuk mengembangkan potensi ekonomi setempat.

Pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal menuntut pemerintah daerah memahami keunggulan komparatif wilayah, ekosistem usaha mikro dan kecil, rantai nilai komoditas, serta hambatan layanan publik yang mempengaruhi produktivitas masyarakat.

5.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses penguatan kapasitas warga agar mampu berpartisipasi, mengakses sumber daya, dan mempengaruhi keputusan pembangunan yang menyangkut kehidupan mereka. Pendekatan ini penting karena pembangunan berkelanjutan tidak mungkin dicapai apabila masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima program, bukan subjek kebijakan.

5.3 Pembangunan Berbasis Lingkungan

Dimensi lingkungan dalam pembangunan daerah menuntut kebijakan yang menjaga daya dukung ekologi, mengurangi risiko bencana, mendorong efisiensi sumber daya, serta memperhatikan keberlanjutan ruang hidup. Ini penting terutama pada daerah yang menghadapi konflik tata ruang, pengelolaan sampah, kualitas air, dan degradasi lahan.

5.4 Digital Governance dan Smart Region

Digital governance adalah pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas tata kelola, efisiensi proses, integrasi data, dan mutu pelayanan publik. Dalam pembangunan daerah, digital governance dapat mendukung perencanaan, pemantauan program, pelayanan perizinan, penanganan pengaduan, dan penguatan transparansi.

Isu	Dimensi dominan	Instrumen kebijakan	Contoh inovasi daerah
Kemiskinan dan stunting	Sosial-ekonomi	Intervensi terintegrasi lintas OPD	Dashboard keluarga rentan dan konvergensi layanan
UMKM lemah	Ekonomi	Pelatihan, akses pasar, perizinan	Sistem layanan UMKM berbasis digital
Sampah dan lingkungan	Lingkungan	Regulasi, insentif, edukasi	Bank sampah digital dan pemetaan titik kritis
Layanan desa	Tata kelola	Digitalisasi administrasi dan data	Aplikasi desa, layanan surat elektronik

Tabel 6. Matriks isu strategis pembangunan daerah berkelanjutan

Contoh Kasus Administrasi Publik

Pemerintah daerah meluncurkan aplikasi layanan terpadu, tetapi tingkat pemanfaatannya rendah karena tidak disertai literasi digital, interoperabilitas data, dan perubahan proses kerja. Kasus ini menunjukkan bahwa transformasi digital harus dibaca sebagai reformasi tata kelola, bukan sekadar pengadaan aplikasi.

Studi Smart Village / Smart Region

Smart village dan smart region menjadi relevan ketika data pembangunan, layanan publik, pemantauan program, dan partisipasi warga dapat dihubungkan dalam satu ekosistem kebijakan. Dengan demikian, inovasi digital mendukung keputusan yang lebih cepat, transparan, dan terukur.

5.5 Ringkasan, Latihan, dan Tugas

Bab ini menekankan bahwa inovasi, pemberdayaan, kelestarian lingkungan, dan digital governance bukan tema yang terpisah. Keempatnya adalah bagian dari agenda pembangunan daerah berkelanjutan yang membutuhkan desain kebijakan adaptif dan tata kelola yang kuat.

- Pilih satu inovasi kebijakan daerah dan nilai apakah inovasi tersebut hanya bersifat administratif atau benar-benar menciptakan dampak pembangunan.
- Analisis satu program pemberdayaan masyarakat dengan kerangka partisipasi, kapasitas, dan keberlanjutan.
- Buat ulasan singkat tentang potensi digital governance untuk memperbaiki tata kelola pembangunan di daerah Anda.

BAB 6 ANALISIS KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN STUDI KASUS

6.1 Analisis Kebijakan sebagai Kompetensi Inti

Analisis kebijakan adalah proses sistematis untuk memahami masalah publik, menilai alternatif, membandingkan konsekuensi, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Dalam konteks pembangunan daerah, analisis kebijakan harus berbasis data, memahami konteks kelembagaan, serta mempertimbangkan kelayakan politik, administratif, sosial, dan fiskal.

6.2 Langkah Analisis Kebijakan

Langkah pertama adalah mendefinisikan masalah secara tepat. Mahasiswa harus mampu membedakan gejala dan akar masalah, sekaligus menunjukkan siapa yang terdampak dan mengapa kebijakan eksisting belum cukup menjawab persoalan.

Langkah kedua adalah mengumpulkan bukti. Bukti dapat berupa dokumen kebijakan, data statistik, laporan kinerja, hasil penelitian, regulasi, wawancara, observasi, dan praktik baik dari daerah lain. Kualitas rekomendasi sangat dipengaruhi oleh kualitas bukti yang dipakai.

Langkah ketiga adalah merumuskan alternatif kebijakan dan menilai masing-masing berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kelayakan politik, dan kapasitas implementasi. Langkah terakhir adalah menyusun rekomendasi yang tajam, realistis, dan komunikatif.

6.3 Studi Kasus dan Penulisan Policy Brief

RPS menekankan penyusunan analisis kebijakan pembangunan daerah berbasis studi kasus. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami bentuk policy brief sebagai luaran akademik-praktis yang ringkas, argumentatif, dan fokus pada rekomendasi kebijakan.

Tahap	Isi utama	Pertanyaan pemandu
Identifikasi masalah	Latar isu, data dasar, urgensi	Masalah apa yang paling mendesak dan siapa yang terdampak?
Analisis kebijakan	Diagnosis penyebab, aktor, kebijakan eksisting	Mengapa masalah bertahan dan apa kekurangan kebijakan saat ini?
Alternatif kebijakan	Pilihan intervensi	Pilihan mana yang paling efektif, adil, dan layak?
Rekomendasi	Usulan prioritas dan langkah tindak lanjut	Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah sekarang?

Tabel 7. Langkah penyusunan policy brief

Masalah	Bukti	Alternatif	Rekomendasi	Strategi implementasi
---------	-------	------------	-------------	-----------------------

Gambar 3. Alur penyusunan policy brief

Contoh Kasus Administrasi Publik

Kasus pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal dapat dianalisis dengan melihat kesenjangan antara dokumen rencana dan realitas lapangan: apakah dukungan perizinan, pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran sudah terintegrasi; siapa aktor kunci; dan bagaimana dampaknya terhadap kelompok rentan.

Studi Smart Region

Dalam analisis kebijakan digital governance, mahasiswa dapat menilai apakah sistem digital hanya memindahkan layanan ke kanal elektronik atau benar-benar memperbaiki koordinasi data, kualitas keputusan, dan akuntabilitas pembangunan.

6.4 Ringkasan, Latihan, dan Tugas

Bab ini menempatkan analisis kebijakan sebagai kompetensi inti mahasiswa. Policy brief bukan tugas administratif, tetapi produk akademik yang menghubungkan teori, bukti, dan rekomendasi praktis.

- Tentukan satu masalah pembangunan daerah dan tuliskan problem statement dalam satu paragraf akademik.
- Susun matriks aktor dan kepentingan untuk kasus yang Anda pilih.
- Buat rancangan awal policy brief 3-4 halaman berbasis satu isu pembangunan di daerah Anda.

BAB 7 PROYEK AKADEMIK, PENILAIAN, DAN LUARAN PEMBELAJARAN

7.1 Model Project-Based Learning

Mata kuliah ini menggunakan project-based learning. Artinya, pembelajaran dirancang untuk menghasilkan produk akademik yang berkembang secara bertahap melalui diskusi, studi kasus, penugasan analitis, presentasi, dan seminar kelas. Dalam kerangka ini, mahasiswa didorong menjadi pembelajar aktif yang tidak hanya menyerap konsep, tetapi juga memproduksi analisis.

7.2 Bentuk Tugas Utama

Berdasarkan RPS, tugas utama mahasiswa berupa analisis implementasi kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan pada tingkat pemerintah daerah, disertai rekomendasi kebijakan yang relevan. Luaran dapat berbentuk makalah akademik atau policy brief yang berangkat dari studi dokumen, kajian literatur, dan analisis konteks empiris.

- memilih satu kasus kebijakan pembangunan daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, atau kota;
- mengumpulkan dokumen kebijakan seperti RPJMD, RKPD, laporan pembangunan, dan data statistik relevan;
- menganalisis implikasi kebijakan terhadap dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- menyusun rekomendasi kebijakan yang realistis dan dapat diimplementasikan;

7.3 Portofolio Penilaian

Skema penilaian pada RPS menunjukkan keseimbangan antara evaluasi formatif dan sumatif. Mahasiswa dinilai melalui diskusi reflektif, penugasan analitis, presentasi, studi kasus, ujian tertulis, dan proyek akhir.

Aspek	Deskripsi	Bobot
Ketepatan analisis konsep	Kemampuan menjelaskan konsep pembangunan daerah berkelanjutan secara teoritis dan kontekstual	20%
Analisis kebijakan	Kemampuan menganalisis kebijakan daerah secara kritis dan sistematis	25%
Kedalaman argumentasi	Kemampuan menghubungkan teori, data, dan praktik daerah	20%
Kualitas rekomendasi	Relevansi, kejelasan, dan aplikabilitas rekomendasi kebijakan	20%
Sistematika penulisan	Struktur, penggunaan referensi, dan ketepatan gaya akademik	15%

7.4 Standar Luaran

Luaran pembelajaran yang baik ditandai oleh ketepatan merumuskan masalah, penggunaan sumber ilmiah yang memadai, ketajaman analisis, keterhubungan dengan teori administrasi publik, dan kemampuan menyusun rekomendasi kebijakan yang meyakinkan.

Catatan Editorial Akademik

Pada praktik penyusunan tugas, mahasiswa perlu menjaga konsistensi istilah, kualitas sitasi, dan integritas akademik. Dokumen analisis kebijakan harus bebas dari plagiarisme, menggunakan bahasa formal, serta menunjukkan posisi penulis yang argumentatif tetapi berbasis bukti.

7.5 Ringkasan, Latihan, dan Tugas

Bab ini menegaskan bahwa proyek semester merupakan sarana integrasi seluruh capaian pembelajaran. Karena itu, kualitas proses sama pentingnya dengan kualitas produk akhir.

- Susun outline tugas akhir Anda dalam format policy brief atau makalah akademik.
- Buat jadwal kerja pribadi dari pemilihan isu sampai seminar kelas.
- Lakukan self-assessment awal menggunakan rubrik proyek akhir.

BAB 8 PENUTUP

Modul Administrasi Pembangunan Daerah Berkelanjutan ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami hubungan antara teori administrasi publik, tata kelola pembangunan, kebijakan daerah, dan praktik analisis berbasis bukti. Melalui pendekatan project-based learning, modul ini menempatkan mahasiswa sebagai analis kebijakan yang aktif, reflektif, dan bertanggung jawab.

Ke depan, pembelajaran mata kuliah ini dapat terus diperkaya dengan studi kasus daerah, pembacaan dokumen perencanaan yang lebih intensif, pemanfaatan dashboard data pembangunan, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan desa. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya memperkuat kompetensi akademik, tetapi juga memperbesar kontribusi program studi terhadap pemecahan masalah publik.

Pesan Akademik Penutup

Keberhasilan pembangunan daerah berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen perencanaan, tetapi oleh kemampuan institusi publik mengubah pengetahuan, partisipasi, dan data menjadi keputusan yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brinkerhoff, D. W., & Crosby, B. L. (2018). *Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision Makers in Developing and Transitioning Countries*.
- Conyers, D. (2019). *An Introduction to Social Planning in the Third World*.
- Faguet, J. P. (2019). *Decentralization and Governance*.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*.
- Osborne, S. P. (2018). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *Governance, Politics and the State*.
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (2018). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- World Bank. (2020). *World Development Report: Governance and the Law*.
- Beberapa artikel dosen pengampu yang dirujuk dalam RPS, terutama mengenai stunting, collaborative governance, transformasi digital kawasan rural, dan implementasi kebijakan pembangunan daerah.

LAMPIRAN 1. PETA CAPAIAN PEMBELAJARAN

Lampiran ini merangkum struktur capaian pembelajaran mata kuliah sebagaimana diturunkan dari RPS ke dalam modul pembelajaran.

CPL/CPMK/Sub-CPMK	Inti kemampuan
CPL 1-6	Analisis administrasi publik, kebijakan pembangunan, kolaborasi, riset, good governance, dan etika profesional
CPMK 1	Analisis konsep dan paradigma pembangunan daerah berkelanjutan
CPMK 2	Evaluasi kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka keberlanjutan
CPMK 3	Perumusan strategi tata kelola kolaboratif
CPMK 4	Pengembangan model atau rekomendasi kebijakan berbasis bukti
Sub-CPMK 1-6	Konsep dasar, hubungan kebijakan-pembangunan, evaluasi implementasi, identifikasi aktor, perancangan strategi, penyusunan analisis kebijakan

Lampiran Tabel 1. Ringkasan keterkaitan capaian pembelajaran

LAMPIRAN 2. RUBRIK PENILAIAN POLICY BRIEF

Rubrik ini dapat digunakan dosen dan mahasiswa untuk menilai kualitas policy brief secara lebih objektif dan konsisten.

Aspek	Indikator mutu	Skor maksimum	Bobot
Perumusan masalah	Masalah jelas, aktual, berbasis data, dan relevan dengan kewenangan pemerintah daerah	4	20%
Kualitas bukti	Menggunakan sumber ilmiah dan data kebijakan yang memadai	4	20%
Analisis alternatif	Mampu membandingkan pilihan kebijakan secara kritis	4	20%
Kualitas rekomendasi	Rekomendasi realistis, aplikatif, dan berkelanjutan	4	25%
Kejelasan penulisan	Struktur, sitasi, bahasa akademik, dan kerapian naskah	4	15%

Lampiran Tabel 2. Rubrik penilaian policy brief

LAMPIRAN 3. TEMPLATE POLICY BRIEF

Template berikut dapat digunakan mahasiswa untuk menyusun luaran proyek akhir.

- Judul singkat dan spesifik.
- Ringkasan eksekutif (1 paragraf): masalah, temuan utama, rekomendasi utama.
- Latar belakang masalah: data, konteks, urgensi.
- Analisis kebijakan eksisting: kekuatan, kelemahan, dan celah implementasi.
- Alternatif kebijakan: minimal dua opsi.
- Rekomendasi prioritas dan langkah implementasi.
- Daftar rujukan gaya APA.

Format yang dianjurkan adalah 6-10 halaman untuk policy brief, atau 10-15 halaman bila tugas dikembangkan menjadi makalah akademik. Tulisan harus menggunakan sumber ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan, mutakhir, serta bebas plagiarisme.